

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan munculnya ide-ide baru mengenai organisasi dan definisi tentang identitas. Ide baru tentang organisasi meliputi bentuk kepemimpinan yang baru. Sedangkan definisi yang baru mengenai identitas meliputi analisis yang mendalam tentang lingkungan Agama, sosial, politik, dan ekonomi.¹

Muslim Indonesia sebagai mayoritas penduduk secara aktif terlibat dalam konsep pengembangan nasionalisme Indonesia. Mereka mengambil bagian dari organisasi sekuler seperti Budi Utomo atau organisasi keagamaan seperti SI (Syarikat Islam), Muhammadiyah, NU (Nahdlatul Ulama), dan Persis (Persatuan Islam). Walaupun terjadi kompetisi antara Islam dan Kristiani, umat Islam bersama-sama dengan masyarakat Indonesia berjuang melawan penjajah Belanda dan penjajah Jepang.²

Kemudian umat Islam mendirikan MIAI (*Majlis Islam A'la Indonesia*) yang berjuang untuk menjaga kepentingan umat Islam dibawah pendudukan Jepang. Golongan nasionalis Islam memperoleh perhatian istimewa dari pemerintah pendudukan

¹Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2010),.p. 353.

²Nanang Tahqiq, *Politik Islam*, (Jakarta: Prenada media, 2004),. p.52.

Jepang. Golongan nasionalis Islam lebih banyak memperoleh kelonggaran dibandingkan dengan golongan nasionalis sekuler karena dinilai pada dasarnya anti-barat, sedangkan golongan nasionalis Islam lebih kepada agama dan dapat diandalkan, sehingga mengizinkan tetap berdirinya organisasi Islam dari masa Hindia Belanda yaitu MIAI (*Majelis Islam A'la Indonesia*).³

Jepang membentuk organisasi baru pada Oktober 1943 yang bertujuan untuk mengendalikan Islam. MIAI dibubarkan dan digantikan oleh Masyumi (*Majelis Syuro Muslimin Indonesia*) yang mempunyai cabang-cabang di setiap Kresidenan di Jawa. Pihak Jepang benar-benar melangkahi para politikus Islam modernis perkotaan yang sebelumnya berhasil mendominasi MIAI.⁴ Pada mulanya Masyumi merupakan suatu badan federasi dan tidak berpolitik. Kemudian pada November 1945 setelah kemerdekaan Republik Indonesia kemudian Masyumi beralih menjadi partai politik Islam tunggal. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan memberi kebebasan berpolitik dan berdemokrasi, sehingga muncul partai-partai politik termasuk partai Masyumi.⁵

Partai Masyumi berdiri pada tanggal 7-8 November 1945 di Yogyakarta, awalnya merupakan perhimpunan organisasi keagamaan dari yang berfaham tradisionalis seperti Nahdlatul

³Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia jilid VI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), p.24.

⁴Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern.....*, p.435-436

⁵Aliyah Hidayati, Skripsi, *Konflik Pki dan Masyumi: Kajian tragedi babakan Pandeglang tahun 1958*, (IAIN SMH Banten, 2016), p.34.

Ulama dan berhaluan modernis seperti Muhammadiyah, organisasi Islam lain seperti Persatuan Islam (Persis) di Bandung, dan Al-Irsyad di Jakarta, Al-Jamiyatul Washiliyah dan Al-Ittihadiyah di Sumatera Utara, Persatuan Umat Islam Majalengka dan Sukabumi, Persatuan Islam di Periang dan Bengil, Pusa di Aceh, Mathla'ul Anwar di Banten dan Nahdhatul Wathan di Lombok menyatakan dukungan dan bergabung dengan Masyumi.⁶

Faktor yang menyebabkan Masyumi dapat berkembang pesat di penjuru tanah air adalah peranan ulama setempat, serta ukhuwah Islamiyah yang tinggi pada masa sesudah revolusi. Banyak orang dalam politik mengidentikkan dengan partai Masyumi merupakan partai yang bernaung dalam Islam. Pada masa revolusi dukunganpun datang dari Hizbullah, suatu organisasi bersenjata yang dibentuk pada waktu pendudukan Jepang untuk pemuda Islam, dan satu-satunya organisasi bersenjata Islam untuk angkatan muda.⁷ Disamping mendapat dukungan dari anggota istimewa, Masyumi mendirikan “anak organisasi” yaitu Muslimat (untuk wanita), Sarikat Dagang Islam Indonesia, Sarikat Tani Islam Indonesia yang didirikan pada masa revolusi. Sedangkan Serikat Nelayan Indonesia dan Serikat Buruh Indonesia pada tahun 1950-an.⁸

⁶ Daliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional; Kisan dan Analisis Perkembangan Partai Politik Indonesia, 1945-1965*, (Bandung: Mizan, 2000),p.59.

⁷ Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional...*,p.60.

⁸ Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional...*,p.60.

Walaupun Masyumi sebagai partai Islam terbesar di Indonesia yang mempunyai pendukung Laskar Hizbullah dan barisan Sabililah, serta berperan besar dalam pembentukan; BKR (Badan Keamanan Rakyat), pada tanggal 22 Agustus 1945; TKR (Tentara Keamanan Rakyat), tanggal 5 Oktober 1945; RTI (Tentara Republik Indonesia), tanggal 24 Januari 1945; TNI (Tentara Nasional Indonesia), tanggal 5 Mei 1947, namun tidak pernah dalam perjalanan sejarahnya melakukan kudeta terhadap pemerintahan Republik Indonesia.⁹

Adapun pimpinan partai yang merupakan *Intellectual brain trust* adalah Chdratoesyeh Rois Akbar K.H. Hasyim Asyari, K.H. Wachid Hasyim, Dr. Soekiman Wirosandjojo, Mohammad Natsir, Mohammad Roem, Syafruddin Prawiranegara, Joesoef Wibisono, H. Agoes Salim, dan Aroedji Kartawinata.¹⁰ Kepemimpinan Masyumi diserahkan kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Hasyim Asyari pendiri Nahdlatul Ulama yang pernah dipenjarakan oleh Jepang pada awal pendudukan Jepang, tetapi kemudian dibebaskan pada bulan Agustus tahun 1942, dan dijadikan sebagai Ketua Masyumi, namun Hasyim Asyari tetap tinggal di pesantrennya di Jombang. Yang menjadi ketua efektif adalah putranya, K.H.A. Wachid Hasyim.¹¹

⁹Ahmad Mansur Suryanegara. *Api Sejarah 2*, (Bandung: Salamadani Pustaka Semesta, 2010), p.180-183.

¹⁰Suryanegara. *Api Sejarah 2*...., p.180-183

¹¹Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*...p.436.

Pada saat pendudukan Jepang itu, tepatnya tanggal 24 Oktober tahun 1943 Wachid Hasyim ditunjuk menjadi salah seorang pemimpin Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia).¹²Selain itu Wachid Hasyim ikut serta dalam mempersiapkan proses kemerdekaan Indonesia dan berpartisipasi dalam BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).¹³

Berdirinya partai Masyumi dalam kongres Umat Islam Indonesia itu berdasarkan pertimbangan bahwa “Perjuangan umat Islam Indonesia untuk menegakkan Agama Allah dan kedaulatan Agama RI, dapat dilakukan sempurna-sempurnanya dengan kebulatan tenaga dan *himmah* (cita-cita) dari segenap umat Islam Indonesia yang tersusun dan dikerahkan dalam satu badan perjuangan politik, maka kongres memutuskan bahwa badan perjuangan politik ini diciptakan sebagai dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang sampai sekarang merupakan satu pusat permusyawaratan umat Islam Indonesia menjadi satu-satunya partai politik Islam Indonesia.¹⁴

Wachid Hasyim paham akan prinsip *Syiasah* (politik) dalam Islam. Saat memimpin partai Masyumi pada masa pendudukan Jepang, dia bisa bebas mengobarkan semangat

¹²Tempo, Seri Tokoh Tempo: *Wachid Hasyim (Untuk Republik dari Tebuireng)*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia), 2011), p.87.

¹³Tahqiq, *Politik Islam...*,p.52.

¹⁴Artawijaya, *Belajar dari Partai Masyumi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014),p.50.

merdeka. Melalui majalah *Suara Muslimin Indonesia*, terasura anti penjajahan, dan saat menjadi wakil ketua Masyumi, Wachid Hasyim merintis pembentukan barisan Hizbullah yang membantu perjuangan umat Islam dalam mewujudkan kemerdekaan.¹⁵

Pandangan Wachid Hasyim-lah yang membuat ketertarikan penulis untuk mengungkap peranan K.H.A. Wachid Hasyim dalam Partai Masyumi. Selain seorang pahlawan Nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, Beliauupun merupakan seorang kiyai pembaharu pondok pesantren Tebuireng dan pendidikan Islam di Indonesia.¹⁶

Dari latar belakang tersebut penulis memfokuskan pada penelitian **Peranan K.H.A. Wachid Hasyim dalam Partai Masyumi Tahun 1945-1952.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Riwayat Hidup K.H.A. Wachid Hasyim?
2. Bagaimana Pertumbuhan dan Perkembangan Partai Masyumi?
3. Bagaimana Kontribusi K.H.A. Wachid Hasyim dalam Perkembangan Partai Masyumi?

¹⁵Tempo, *Seri Tokoh Tempo*....p.87.

¹⁶ Johan Prasetya, *Pahlawan-pahlawan Bangsa yang Terlupakan* (Jogjakarta: SAUFA, 2014),p. 57.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk tersusunnya deskripsi yang dapat menjelaskan tentang:

1. Riwayat Hidup K.H. A.Wachid Hasyim.
2. Pertumbuhan dan Perkembangan Partai Masyumi.
3. Kontribusi K.H.A. Wachid Hasyim dalam Perkembangan Partai Masyumi?

D. Kerangka Pemikiran

Teori politik merupakan bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan kata lain, teori politik adalah bahasan dan renungan atas tujuan dari kegiatan politik, cara-cara mencapai tujuan, kemungkinan dan kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik. Konsep yang dibahas dalam teori politik yaitu masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan social, pembangunan politik dan modernisasi.

Menurut Thomas P. Jenkin dalam *The Study of Political Theory* dapat dibedakan dua macam teori politik yaitu:

- a. Teori-teori yang mempunyai dan yang bersifat akhlak dan menentukan norma-norma untuk perilaku politik (*Norms for political Behavior*).
- b. Teori-teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak

mempersoalkan norma-norma atau nilai. Teori ini membahas fakta-fakta kehidupan politik.¹⁷

Pemikiran politik Islam pada masa pertengahan ditandai dengan pandangan yang bersifat khalifah sentris. Kepala Negara atau khalifah memegang peranan penting dan memiliki kekuasaan yang sangat luas.¹⁸ Perubahan konsep bermula dari pernyataan Abu Ja'far Al-Mansur ketika berhasil menumbuhkan kekhalifahan dinasti Bani Umayyah. Abu Ja'far Al-Mansur mengklaim dirinya sebagai bayang-bayang Tuhan di muka bumi” *Zhill Allah fi al-Ardh*”. Konsekuensi pernyataan ini adalah kekuasaan khalifah berasal dari mandat Tuhan, bukan pilihan rakyat. Perubahan ini juga tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh konsep dan praktik politik asing. Karena pada masa itu kekuasaan Islam sudah keluar Jazirah Arab. Umat Islam mengalami interaksi sosial politik, dan budaya dengan masyarakat-masyarakat non-Arab. Konsep Politik diluar Islam ketika itu menjadikan raja, kaisar, atau kiswa sebagai titisan dari Tuhan.¹⁹

Pemikiran politik Islam Abad Klasik dan Pertengahan seperti pemikiran politik Al-Ghazali. Al-Ghazali melukiskan hubungan antara agama dan kekuasaan politik dengan sebuah

¹⁷ Mariam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), p.43-45

¹⁸ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam: Dari masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2013), p.1.

¹⁹ Iqbal, *Pemikiran Politik Islam...*, p.3.

ungkapan.²⁰yaitu: “Sultan (disini berarti kekuasaan politik) wajib untuk ketertiban dunia, ketertiban dunia wajib bagi ketertiban agama, ketertiban agama wajib bagi keberhasilan di akhirat. Inilah tujuan sebenarnya para Rasul. Jadi wajib adanya imam merupakan kewajiban agama dan tidak ada jalan untuk meninggalkannya.” sedangkan pendapat Al-Mawardi bahwa mendirikan Imamah adalah wajib.

Pendapat Al-Ghazali tidaklah jauh berbeda dengan Al-Mawardi tentang bentuk pemerintahan. Kewajiban mendirikan suatu pemerintahan dan mengangkat imam yang berfungsi untuk mengurus persoalan agama dan dunia. Imam atau pemimpin menurut sejarah politik Islam disebut dengan istilah Khalifah. Menurut Al-Ghazali, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, mereka hidup bermasyarakat dan bernegara.²¹

Menurut Al-Ghazali pembentukan negara bukan hanya untuk memenuhi kehidupan duniawi, melainkan juga untuk persiapan kehidupan akhirat. Menurut pendapat Al-Ghazali kewajiban pembentukan negara dan pemilihan kepala negara bukanlah berdasarkan pertimbangan rasio, melainkan berdasarkan kewajiban agama (Syar'i). Karena kebahagiaan dan kesejahteraan diakhirat tidak tercapai tanpa pengalaman dan penghayatan agama secara benar. Karenanya Al-Ghazali menyatakan bahwa agama dan negara (pemimpin negara) bagaikan dua saudara

²⁰Iqbal, *Pemikiran Politik Islam*....p.28.

²¹Iqbal, *Pemikiran Politik Islam*....p.29.

kembar yang lahir dari rahim seorang ibu. Keduanya saling melengkapi.²²

Munawir Sjadzeli²³ berpendapat mengenai empat hal yang dapat mendukung gagasan tentang negara non-Islam yaitu, ajaran Islam, sejarah awal Islam, wacana intelektual Islam dan negara, dan praktik politik muslim. Bahwa sistem politik adalah suatu konsep politik yang ada memfokuskan pada siapa akan menjadi sumber otoritas negara, pemutus otoritas seperti, basis dan metode penentuan siapa yang memiliki otoritas tersebut, kepada siapa otoritas harus bertanggung jawab dan bentuk tanggung jawabnya.²⁴

Partai Politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Partai Politik awalnya lahir dari negara-negara Eropa Barat. Dengan gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang dapat diikuti sertakan dalam proses politik, maka partai politik lahir dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah.²⁵ Pada awal perkembangan partai Politik akhir abad 18 di negara Barat seperti Inggris dan Spanyol, kegiatan politik ini dipusatkan pada kelompok politik dalam parlemen. Kegiatan ini awalnya

²²Iqbal, *Pemikiran Politik Islam...*,p.29.

²³Seorang pemikir agama dan diplomat, mentrei agama pada cabinet REPELITA IV (1983-1988) dan REPELITA IV (1983-1993)

²⁴Tahqiq, *Politik Islam...*,p.62-63.

²⁵Mariam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik...*,p.397-398.

bersifat elitis dan aristokratis. Untuk mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntunan-tuntunan raja.²⁶

Kegiatan Politik juga berkembang diluar parlemen. Terbentuknya panitia untuk mengatur pengumpulan suara. Oleh Karena itu dibutuhkan dukungan dari berbagai golongan seperti masyarakat, kelompok-kelompok politik dan kemudian mengembangkan organisasi massa pada akhir abad ke-19. Lahirnya partai politik, kemudian berkembang menjadi peghubung (*link*) antara ralyat disuatu pihak dan pemerintah di pihak lain.²⁷

Sarjana ahli ilmu klasik dan kontemporer Carl J. Friedrich mendefinisikan partai politik yaitu:²⁸ Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya dan berdasarkan penguasaan, ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan dan bersifat ideal serta materil (*Apolitical, party is a group of human beings, stably organized with objective of scuring or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party through such control ideal and material benefits and adventages*)

²⁶Mariam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*....p.398.

²⁷Mariam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*....p.398.

²⁸Mariam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*....p.404.

Sigmund Neuman dalam karyanya *Modern Political Parties*, mendefinisikan partai yaitu, partai Politik adalah organisasi dari aktifis-aktifis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda (*A Political party is the articulate organization of society's active political agents; those who are concerned with the control of governmental polity power, and who compte for popular support with other or groups holding divergent views*).²⁹

Menurut Neuman dalam karyanya *Modern Political Parties* "partai politik merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dan lembaga-lembaga pemerintahan". Jadi dapat disimpulkan, partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir mempunyai orientasi dan nilai-nilai dan cita-cita yang sama.

Penulis dalam penelitiannya menggunakan teori Neuman mengenai "partai politik", pertumbuhan dan perkembangan partai politik yang ada di Indonesia yaitu untuk terlaksananya suatu tujuan dari sekelompok orang untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik. Dalam teori partai politik, berdirinya sebuah partai karena ingin mewujudkan tujuan dari berbagai golongan untuk kepentingan yang sama. Pertumbuhan partai politik diawali dengan berdirinya

²⁹Mariam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*...p.404

partai Islam pertama di Indonesia yaitu partai Masyumi. Partai Masyumi diikuti dari berbagai organisasi dan sosial keagamaan yang bersatu dalam partai Masyumi untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama demi kemajuan bangsa Indonesia. Dari teori Neuman "partai politik" bangsa Indonesia dapat bersatu dari berbagai golongan organisasi dan sosial keagamaan yang ada untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

E. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Penelitian Sejarah, yaitu mengikuti peraturan-peraturan dengan mengumpulkan sumber-sumber kemudian mengkritik sumber yang diperoleh dan menafsirkannya untuk menemukan kebenarannya. Menurut Kuntowijoyo bagian Metode Penelitian Sejarah memiliki lima tahapan penelitian yaitu Pemilihan Topik, Pengumpulan Sumber, Kritik Sejarah, Interpretasi dan Historiografi.³⁰

1. Pemilihan Topik

Pemilihan Topik adalah mencari masalah yang dapat dijadikan sebuah penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan topik yang *Workable* dapat dikerjakan dalam waktu yang tersedia. Dalam pemilihan topik dipilih berdasarkan: kedekatan emosional dan kedekatan Intelektual, karena dua hal tersebut merupakan subjektif dan objektif dari sebuah penelitian.

³⁰Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2001),p.91.

Kedekatan emosional berkaitan dengan topik penelitian dengan menggunakan (*What, When, Where, When dan How*) dapat membantu peneliti untuk menemukan informasi mengenai permasalahan dalam topik penelitian. Sedangkan kedekatan intelektual yaitu pendekatan peneliti terhadap disiplin ilmu yang lain dengan melalui studi pustaka. Adapun pendekatan yang penulis gunakan yaitu pendekatan Intelektual karena penulis menggunakan sumber studi pustaka sebagai bahan informasi dari topik yang diteliti.

2. Pengumpulan Sumber (Heuristik)

Pengumpulan sumber berarti mengumpulkan sumber-sumber yang terkait dengan topik pembahasan. Terdapat sumber primer³¹ dan sumber sekunder³² Dalam pengumpulan sumber, peneliti mengunjungi perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Banten (IAIN), perpustakaan Umum Daerah (PUSDA) dan koleksi pribadi penulis. Dari kunjungan tersebut penulis mendapatkan sumber-sumber yang terkait dengan topik pembahasannya. Peranan K.H.A. Wachid Hasyim dalam Partai Masyumi tahun 1943-1945, yaitu Johan Prasetya dengan judul . *Pahlawan-pahlawan Bangsa yang Terlupakan* diterbitkan di Jogjakarta: SAUFA, 2014, Seri buku majalah TEMPO dengan judul. *Wahid Hasyim: Untuk Republik dari Tebuireng*

³¹Informasi yang diperoleh dengan mengetahui secara langsung atau sezaman dengan peristiwa sejarah baik secara lisan maupun tulisan.

³²Informasi yang diperoleh melalui perantara yang tidak secara langsung terlibat dengan terjadinya sebuah peristiwa secara lisan maupun tulisan.

diterbitkan di Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2011. Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution dengan judul *Pemikiran Politik Islam: Dari masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*, diterbitkan di Jakarta: Kencana, 2013. Nanang Tahqiq dengan judul *Politik Islam* diterbitkan di Jakarta: Prenada media, 2004. Ricklefs dengan judul *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, diterbitkan di Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2010. Kuntowijoyo dengan judul *Pengantar Ilmu Sejarah*, diterbitkan di Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2001. Artawijayadengan judul, *Belajar dari Partai Masyumi*, diterbitkan di Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014. Ahmad Mansur Suryanegara, dengan judul *Api Sejarah 2*, diterbitkan di Bandung: Salamadani Pustaka Semesta, 2010.

3. Kritik Sumber (Verifikasi)

Tahap selanjutnya yaitu tahap verifikasi atau disebut dengan kritik sejarah yaitu penafsiran terhadap sumber-sumber yang diperoleh baik secara interen maupun eksteren. Pada tahap ini penulis dapat membedakan sumber primer dan sekunder yang terkait dengan topik. Diantaranya sumber atau buku-buku yang berhasil penulis kritik dengan judul, adalah sebagai berikut:

1. *Partai Islam di Pentas Nasional*, Karangan Daliar Noer.

Dalam buku *Partai Islam dipentas Nasional* karangan Daliar Noer, dijelaskan tentang pandangan pemerintah terhadap partai-partai di Indonesia, khususnya partai

Masyumi.³³ Yang tersusun secara kronologis dan lengkap yang memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian.

2. *Partai Masyumi antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral*, karangan Remy Medinier.

Dalam buku *Partai Masyumi antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral*, karangan Remy Medinier, dijelaskan tentang latar belakang dan sejarah berdirinya partai Masyumi. Buku ini lengkap dalam membahas partai Masyumi di Indonesia. Dilengkapi dengan peta Indonesia, gambar karikatur dan terdapat indeks untuk mempermudah pembaca dalam mencari kata-kata yang sulit untuk ditemukan.

3. *Sejarah Hidup K.H.A. Wachid Hasyim*, karangan Aboebakar,

Dalam buku *Sejarah Hidup K.H.A. Wachid Hasyim*, karangan Aboebakar dijelaskan tentang riwayat hidup K.H.A. Wachid Hasyim, keluarga dan pendidikannya. Selain itu terdapat pula kiprahnya di MIAI, Masyumi, NU, Liga Muslim dan Kementerian Agama. Buku ini dilengkapi dengan indeks untuk mempermudah pembaca. Buku ini menjadi sumber Primer bagi peneliti untuk mengetahui riwayat hidup K.H.A. Wachid Hasyim.

³³Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*,...p.159-186.

4. Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran terhadap sumber sejarah, dari bentuk lisan maupun tulisan ditafsirkan kedalam bentuk kata-kata atau bentuk deskripsi. Penafsiran ini berguna untuk menjawab atas sumber yang diperoleh dari pertanyaan (*What, When, Where, Who dan How*) sehingga menghasilkan fakta sejarah.

5. Penulisan (Historiografi)

Penulisan sejarah merupakan cara penulisan hasil dari penelitian, dalam penulisan sejarah menguatkan aspek kronologis sangat penting. Dan penulisannya berbentuk deskriptif yaitu menggambarkan tema-tema penting yang terdapat dalam hasil penelitian

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasannya penulis membagi ke dalam lima bab dan disetiap bab terdapat beberapa sub yang menjelaskan bagian dari penjelasan bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama: Pendahuluan, diantaranya: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua: Riwayat Hidup K.H.A.Wachid Hasyim, berisi tentang, Asal-usul K.H.A. Wachid Hasyim, Pendidikan K.H.A. Wachid Hasyim dan Keluarganya Besar K.H.A. Wachid Hasyim.

Bab ketiga: Pertumbuhan dan Perkembangan Partai Masyumi, berisi Latar Belakang Berdirinya Partai Masyumi, Pertumbuhan Partai Masyumi, Perkembangan Partai Masyumi.

Bab keempat: Kontribusi K.H.A. Wachid Hasyim dalam Perkembangan Partai Masyumi, berisi tentang Strategi Politik K.H.A. Wachid Hasyim dalam Partai Masyumi, Peran K.H.A. Wachid Hasyim Dalam Pembentukan Laskar Hizbullah. Peran K.H.A. Wachid Hasyim dalam pembentukan PHI (Panitia Haji Indonesia)

Bab kelima: Penutup, yang berisi Kesimpulan dan Saran-Saran